BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi di Indonesia masih menghadapi kenyataan bahwa masih luasnya kemiskinan terutama di pedesaan. Kemiskinan berkaitan erat dengan rendahnya pendapatan sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup pokoknya. Pada umumnya di negara berkembang masalah pendapatan yang rendah dan kemiskinan merupakan masalah utama dalam pembangunan ekonomi. Dengan demikian dalam tujuan pembangunan ekonomi kedua hal tersebut selalu dinyatakan bersamaan sehingga menjadi satu kalimat yaitu peningkatan pendapatan nasional dan pengurangan kemiskinan. Dalam upaya meningkatkan pendapatan nasional maka persoalan pendapatan perkapita dari distribusi pendapatan merupakan dimensi yang perlu mendapat perhatian terutama untuk melihat tingkat pendapatan dan pembagian pendapatan di antara warga masyarakatnya yaitu siapa mendapat berapa dan siapa yang beruntung. Aspek ini semakin menarik, terutama dikaitkan dengan masih besarnya rakyat miskin di Indonesia terutama di wilayah pedesaan. Berbicara perihal kemiskinan, maka secara implisit langsung maupun tidak langsung telah membicarakan ketimpangan distribusi pendapatan penduduk. (Suhardjo, 1997:69-86).

Dalam pembangunan nasional Indonesia, masalah kemiskinan di pedesaan merupakan isu utama. Krisis ekonomi yang melanda Indonesia sejak pertengahan tahun 1997 telah menyebabkan bertambahnya penduduk yang hidup di bawah

garis kemiskinan, padahal sebelum terjadinya krisis tersebut jumlah penduduk miskin di Indonesia terus berkurang. Sebelum krisis ekonomi (tahun 1996) jumlah penduduk miskin berjumlah 22,5 jtua jiwa. Akibat krisis ekonomi yang berkelanjutan, sampai dengan akhir 1998, jumlah penduduk miskin telah menjadi 49,5 juta jiwa (24,2 persen dari jumlah penduduk Indonesia. Namun seiring dengan membaiknya ekonomi jumlah penduduk miskin mengalami penurunan. Pada tahun 2002 jumlah penduduk miskin di Indonesia tercatat sebear 38,4 juta jiwa dan diantaranya sekitar 65,36 persen tinggal di pedesaan. Pada tahun 2003 jumlah penduduk miskin tercatat 37,3 juta (17,4 persen). Dibanding tahun 2002 jumlah tersebut menurun sekitar 2,86 persen (BPS, 2003:575-589).

Masyarakat miskin di Indonesia sebagian besar terdapat di daerah pedesaan yang sebagian besar mata pencaharian mereka bergerak disektor pertanian. Sektor pertanian merupakan pusat kemiskinan di Indonesia ada tiga faktor penyebab utamanya antara lain satu, tingkat produktifitas yang rendah disebabkan oleh jumlah pekerja di sektor pertanian sudah terlalu banyak, sedangkan lahan dan teknologi sangat terbatas serta tingkat pendidikan para petani yang rata-rata sangat rendah. Dua, daya saing dalam komoditi pertanian terhadap hasil industri semakin lemah. Tiga, tingkat *diversifikasi* usaha disektor pertanian ke jenis-jenis komoditi *non-food* yang memiliki prospek pasar (terutama ekspor) dengan harga yang lebih baik masih sangat terbatas. (http://matakuliah.com/2007/09/kemiskinan.pdf, [diakses 21 Maret 2009]).

Ketimpangan pendapatan di pedesaan banyak dipengaruhi oleh kondisi *agroekosistem* setempat. Wilayah berproduktivitas rendah mempunyai hubungan

timbal balik dengan kemiskinan, baik sebagai penyebab maupun sebagai akibat. Oleh karena itu, suatu wilayah yang tingkat produktivitasnya rendah dapat mengakibatkan masyarakatnya miskin. Demikian pula sebaliknya, ketidakmampuan masyarakat mengelola sumberdaya mengakibatkan wilayah itu miskin. (Sarasutha dan Noor, 1994:181-182).

Pendapatan rumah tangga pedesaan sangat bervariasi. Variasi itu tidak hanya disebabkan oleh faktor potensi daerah, tetapi juga karakteristik rumah tangga. *Aksesibilitas* ke daerah perkotaan yang merupakan pusat kegiatan ekonomi seringkali merupakan faktor dominan terhadap variasi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu sektor pertanian dan non-pertanian. Besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usaha tani/ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari sektor non-pertanian berasal dari usaha non-pertanian, profesional dan buruh non-pertanian di sektor non-pertanian. Secara teoritis kemiskinan di pedesaan dapat dikurangi bila kesempatan kerja di sektor non-pertanian terbuka. Namun kenyataan tidak demikian karena di pedesaan menghadapi persoalan *aksesibilitas* sehingga kesempatan bekerja di sektor non-pertanian sangat terbatas. Sementara daya dukung lahan pertanian tidak seimbang dengan jumlah penduduk. Rendahnya pendapatan disebabkan oleh kurangnya kesempatan dalam kegiatan produktif terkait dengan keterbatasan aset fisik, modal, dan keterampilan. (http://strategi-dan-inovasi-terhadap-pasar/the-bottom-of_pyramid_dalam_perspektif-tanggung-jawab-sosial-korporasi1.pdf, [diakses 20 April 2009])

Salah satu organisasi internasional yang mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan ialah *International Fund For Agricultural Development* (IFAD). Organisasi ini berada di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak khusus di sektor pertanian. Organisai ini terbentuk dari sebuah keputusan pada Konfrensi Pangan Dunia (*World Food Conference*) yang di selenggarakan pada tahun 1974. Dari hasil konferensi tersebut, menyatakan bahwa sebagian besar penduduk miskin di negara-negara berkembang berpusat di daerah pedesaan. IFAD dibentuk untuk memobilisasi dana dalam program-program yang dapat menghapuskan kemiskinan pedesaan karena organisasi ini mempunyai sebuah mandat yang sangat spesifik, yaitu memerangi kelaparan dan kemiskinan di pedesaan di negara-negara berkembang. (http://www.ifad.org.htm, [diakses 6 Februari 2009]).

Sasaran utama dalam setiap program yang diberikan oleh IFAD ialah para petani-petani yang tergolong di bawah garis kemiskinan agar dapat meningkatkan pendapatanya. Bantuan yang diberikan IFAD memfokuskan pada pengentasan kemiskinan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, pinjaman dana di sediakan untuk negara-negara yang berpenghasilan rendah dengan jangka waktu pinjaman selama 40 tahun dengan bunga 0,75% per tahun. Sesuai dengan kerangka kerja IFAD yang memfokuskan pada pemberantasan kemiskinan dan kelaparan yang merupakan bagian dari komitmen global untuk mengembangkan "*The Millenium Development Goals*" (MDGs). (http://www.ifad.org/EB-2008-95-R-14.pdf, [diakses 10 Februari 2009]).

Millenium Development Goals (MDGs) merupakan sebuah paket target pembangunan yang menjadi tujuan bersama seluruh anggota *United Nations* UN untuk menjadikan dunia ini lebih baik bagi semua orang. (MDGs) tersebut merupakan hasil kesepakatan antar kepala negara anggota UN di dalam forum WSSD (*World Summit for Sustainable Development*) di Johannesburg, Afrika Selatan, pada tahun 2002. Perumusan MDGs merupakan tindak-lanjut dari UN *Millenium Declaration* yang dihasilkan pada *World Summit* di New York pada tahun 2000. Tujuan-tujuan pembangunan di dalam MDGs tersebut dikelompokkan ke dalam 8 (delapan) tujuan besar (*goals*), yaitu Pertama, Menghilangkan kemiskinan ekstrim dan kelaparan. Kedua, Mencapai pendidikan dasar secara universal. Ketiga, Meningkatkan kesetaraan gender dan memberdayakan perempuan. Keempat, Menurunkan kematian bayi. Kelima, Meningkatkan kesehatan ibu. Keenam, Memerangi HIV/AIDS, malaria dan penyakit yang lain. Ketujuh, Menjamin keberlanjutan lingkungan. Kedelapan, menjalin kerjasama global untuk pembangunan. Upaya pencapaian IFAD di agenda *Millenium Development Goals* (MDGs) saat ini adalah, memberatas kemiskinan dan kelaparan di tahun 2015. (*United Nation*, 2008: 56)

Kawasan pedesaan di Sulawesi Tengah yang terletak di dataran tinggi akibat kostur lahannya yang berbukit-bukit dan tidak adanya akses dan pelayanan bagi petani, merupakan salah satu faktor yang menghambat pertumbuhan ekonomi bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah, selain itu adanya peluang perbaikan mata pencaharian dan peningkatan pendapatan yang cukup signifikan, baik dari usaha pertanian maupun usaha non pertanian. Hal inilah yang menjadi

salah satu latar belakang Organisasi *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) dalam menyusun sebuah program pemberdayaan pedesaan dan pembangunan pertanian di Sulawesi Tengah. Program *Rural Empowerment And Agricultural Development* (READ), merupakan sebuah konsep dan inovasi yang dirancang oleh IFAD untuk memperbaiki mata pencaharian meningkatkan pendapatan masyarakat miskin di pedesaan secara bertahap khusus Untuk 48.500 rumah tangga di 150 desa dengan total 220.000 orang di lima kabupaten di provinsi Sulawesi Tengah yaitu, kabupaten Banggai, Boutong, Parigi Moutong, Poso,danToli. (http://www.deptan.go.id/bps dm/read/READ%20Programme pdf, [diakses 6 Februari 2009]).

Sulawesi Tengah merupakan salah satu provinsi di Indonesia khususnya di kepulauan sulawesi yang memiliki tingkat kemiskinan pada masyarakat pedesaan terbesar kedua setelah Sulawesi Selatan. pada tahun 2007 Jumlah penduduk miskin di pedesaan berjumlah 490.3000 orang (24,97%) dan mengalami penurunan pada tahun 2008 sebesar 463.8000 (23,22%). rata-rata upah nominal harian buruh tani selama periode bulan Maret 2007-Maret 2008 meningkat 9,88 persen, naik dari Rp.14.932,- pada Maret 2007 menjadi Rp.16.407,- pada Maret 2008. Pada periode yang sama, rata-rata upah riil harian buruh tani juga mengalami kenaikan 0,90 persen, yaitu dari Rp.2.553,- pada Maret 2007 menjadi Rp.2.576,- pada Maret 2008. Artinya, daya beli buruh tani relatif sedikit membaik. Selama periode Februari 2007-Februari 2008 jumlah penganggur berkurang. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Februari 2007 sebesar 9,75 persen (10,55 juta orang), tetapi turun menjadi 8,46 persen (9,43 juta) pada

Februari 2008. Turunnya pengangguran ini karena terbukanya lapangan kerja di sektor informal secara luas sehingga membuka kemungkinan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin. (http://www.bps.go.id/releases/files/kemiskinan-01jul08.pdf, [diakses 21 Maret 2009]).

Dalam program READ terdapat tujuh tipe karakteristik mata pencaharian rumah tangga yang merupakan kelompok sasaran program tersebut yaitu tipe satu, masyarakat yang tidak memiliki lahan. Tipe dua, petani subsisten di sektor produksi pertanian tanaman pangan. Tipe tiga, petani yang mempunyai tambahan penghasilan dari anggota keluarga yang bekerja di luar desa. Tipe empat, petani yang mempunyai tambahan penghasilan di luar sektor pertanian. Tipe lima, masyarakat yang penghasilan utama keluarga yang lebih berorientasi pada kegiatan yang menghasilkan pendapatan. Tipe enam, masyarakat yang penghasilan utamanya dari pertanian dan usaha-usaha skala kecil. Tipe tujuh, pengusaha pedesaan di sektor pertanian yang memperkerjakan masyarakat setempat dalam jumlah yang cukup signifikan. Program READ juga menyeleksi desa-desa berdasarkan empat indikator yaitu, *index* potensi lahan, indeks keterisolasian, indeks akses pada pelayanan umum, dan index organisasi. Dalam program ini juga terdapat empat komponen yang merupakan langkah-langkah dalam memperbaiki perekonomian masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah yang berpengaruh dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah, keempat komponen itu terdiri dari Pemberdayaan Masyarakat, komponen ini meningkatkan kemampuan masyarakat pedesaan sesuai dengan sumber daya dan peluang yang dimilikinya. Pengembangan Usaha Pertanian Budidaya Dan

Non-Budidaya, komponen ini dimaksudkan untuk menyediakan akses pada teknologi dan keterampilan manajemen yang bergerak sebagai pemasok barang dan jasa bagi petani miskin. Prasarana Pedesaan, komponen ini akan membiayai berbagai prasarana pedesaan yang di butuhkan para masyarakat pedesaan untuk akses pertanian mereka. Pengelolaan Proyek Dan Analisis Kebijakan, komponen ini mendukung pengelolaan dan koordinasi program READ melalui struktur pemerintahan yang ada. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/tampil.php?page=read, [diakses 6 Februari 2009]).

Pada tanggal 22 November 2006, bertempat di Sekretariat *International Fund for Agriculture Development* (IFAD), Duta Besar LBBP Republik Indonesia untuk Italia, Susanto Sutoyo, mewakili Pemerintah Indonesia dan Presiden IFAD, Lenart Bage, telah menandatangani perjanjian pinjaman untuk Program Pemberdayaan Masyarakat Pedesaan dan Pembangunan Pertanian *Rural Empowerment and Agriculture Development Programme* (READ) di Sulawesi Tengah. Di bawah perjanjian pinjaman ini, kedua belah pihak sepakat untuk memulai program kegiatan yang tujuannya adalah perbaikan kehidupan masyarakat miskin pedesaan yang berkesinambungan, serta dimaksudkan untuk mencapai pertumbuhan kegiatan ekonomi yang berkesinambungan dan pengelolaan sumber-sumber daya alam yang meningkat di 150 desa target di lima kabupaten di Sulawesi Tengah (Kabupaten of Banggai, Buol, Parigi Moutong, Poso and Toli-toli). (http://www.deptan.go.id/kln/berita/update-berita-2006.htm, diakses [12 Agustus 2009]).

Sumber lain yang menjelaskan mengenai kerjasama dalam READ dapat dilihat dalam Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.160/6/2007 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Program Pemberdayaan Pedesaan dan Pembangunan Pertanian di Sulawesi Tengah (*Rural Empowerment and Agriculture Development Programme/*READ *Programme in Central Sulawesi*). (Peraturan Menteri Pertanian Nomor : 51/Permentan/OT.160/6/2007).

Program READ direncanakan akan direalisasikan pada tahun 2007-2011 dengan total dana sebesar US$ 28,33 juta. Dana tersebut terdiri dari US$ 21,08 juta dari *loan* IFAD, *grant* IFAD sebesar US$ 9,5 juta, pemerintah pusat sebesar US$ 1,3 juta. Pemerintah provinsi US$ 0,9 juta, pemerintah kabupaten/kota sebesar US$ 1,27 juta. (http://www.ifad.org/gbdocs/eb/88/e/EB-2006-88-R-18-Rev-1.pdf, [diakses 21 Maret 2009]).

Program READ awalnya direncanakan akan berjalan pada tahun 2007-2011. Dalam proses implementasi program terdapat kendala finansial, sehingga terjadi penundaan pelaksanaan program. Perencanaan pelaksanaan program ditunda menjadi tahun 2009-2014. (wawancara dengan Ir. Sri Damayanti, Med.,Mphil. READ *Programme Manager*).

Program ini merupakan sebuah kerjasama antara IFAD dan pemerintah Indonesia dalam bidang pertanian dan merupakan upaya dari pemerintah dalam penangulangan kemiskinaan dan peningkatan pendapatan bagi masyarakat pedesaan. Dalam program ini IFAD berperan sebagai pemberi pinjaman, pembuat program, serta mengawasi program, sehingga dapat di realisasikan dengan baik, sedangkan badan pelaksana program dan lapangan di serahkan kepada

Departemen Pertanian dan Dinas Pertanian di tingkat kota dan kabupaten Provinsi Sulawesi Tengah. Program READ yang di selenggarakan di Sulawesi tengah, selain fokus pada pembangunan pedesaan dan pertanian, program ini juga turut berperan dalam memperbaiki infrastruktur pedesaan di Sulawesi tengah seperti, penyedian lahan bagi para petani miskin, pembangunan saluran irigasi, fasilitas air bersih, dan jalan akses desa serta jalan usaha tani. Minimnya infrakstruktur di provinsi ini, merupakan salah satu faktor yang menghambat pembangunan pedesaan dan pertanian di Sulawesi tengah, karena para petani tidak dapat menjual hasil taninya dan membuat terhanbatnya aktifitas-aktifitas pertanian lainnya, oleh karena itu IFAD melalui program READ ini berupaya menerapakan inovasi-inovasinya dalam perbaikan infrastruktur pedesaan di Sulawesi tengah, sehingga masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah, khusnya para petani dapat dengan mudah mengakses hasil taninya keluar desa dan mendapatkan hasil dari hasil pertaniannya tersebut, sehinnga para petani dapat memenuhi kebutuhan rumah tanggal mereka. (http://www.deptan.go.id/bpsdm/read/READ%20Program1me.pdf, [diakses 6 Februari 2009]).

Hal inilah yang melatar belakangi penulis untuk mengambil judul penelitian.

"Peranan *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) Melalui Program *Rural Empowerment And Agricultural Development* (READ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Sulawesi Tengah – Indonesia".

Penelitian ini dibuat berdasarkan beberapa mata kuliah Pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Komputer Indonesia. Yaitu:

1. Organisasi dan Administrasi Internasional membahas sejauhmana peran suatu aktor ilmu hubungan internasional terutama aktor non-negara dalam menciptakan suatu pola interaksi global.
2. Isu-isu Global mata kuliah ini membahas tentang isu-isu apa saja yang menjadi wacana internasional atau perbincangan masyarakat dunia, seperti isu lingkungan hidup, terorisme, Pangan, gender dan demokrasi.
3. Studi Ekonomi Politik Negara Berkembang melihat permasalahan yang terjadi di negara berkembang, terutama pada sektor pertanian yang merupakan salah satu mata pencaharian utama masyarakat pedesaan di Indonesia.

1.2 Identifikasi Masalah

1. Bagaimana langkah-langkah IFAD melalui program READ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah?
2. Bagaimana perencanaan program READ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah?
3. Bagaimana peranan IFAD melalui program READ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah?

1.3 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah ini berupaya untuk menentukan batas-batas permasalahannya dengan jelas yang memungkinkan untuk mengidentifikasikan faktor-faktor apa saja yang termasuk dalam ruang lingkup permasalahan. Sebagai variabel *Independen*t (Bebas), penelitian ini akan memusatkan pada peranan *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) dilihat dari perencanaan program *Rural Empowerment And Agricultural Development* (READ). Sedangkan untuk variabel *Dependent* (Terikat) yang dipilih adalah dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan di Sulawesi Tengah.

Sehubungan dengan luasnya permasalahan yang ada dalam penelitian ini, maka penulis membatasi rentang waktu penelitian pada proses awal penandatanganan program READ pada tahun 2007-2008, dengan melihat perencanaan pelaksanaan program pada tahun 2009-2014.

1.4 Perumusan Masalah

Berdasarkan identifikasi dan pembatasan masalah diatas maka diajukan perumusan masalah sebagai berikut:

"Bagaimana Peranan *International Fund For Agricultrural Development* (IFAD) Melalui Program *Rural Empowerment And Agricultural Development* (READ) Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Sulawesi Tengah?".

1.5 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.5.1 Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan yang dilakukan hendaknya memiliki suatu tujuan tertentu yang hendak dicapai. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui langkah-langkah program READ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.
2. Untuk mengetahui prospek program READ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.
3. Untuk mengetahui peranan IFAD melalui program READ dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.

1.5.2 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi lebih jauh bagi penulis mengenai kondisi pertanian dan peningkatan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Indonesia khususnya di Sulawesi Tengah.
2. Diharapkan dapat memberikan wawasan bagi para penulis dan para akademisi ilmu Hubungan Internasional dalam meningkatkan kemampuan menggunakan metode dan teknik penelitian serta kemampuan untuk menerapkan teori-teori yang telah diperoleh selama menjalankan studi.

3. Sebagai sumbangan ilmiah terhadap perkembangan ilmu Hubungan Internasional dan menambah wawasan mengenai kondisi pertanian dan peningkatan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.
4. Untuk mengetahui peranan *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) melalui program READ dalam membantu pemerintah indonesia dalam upaya meningkatkan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.
5. Sebagai syarat bagi penulis dalam menyelesaikan studi ilmu Hubungan Internasional (S1) di Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Jurusan Ilmu Hubungan Internasional, Universitas Komputer Indonesia.

1.6 Kerangka Pemikiran, Hipotesis dan Definisi Operasional.

1.6.1 Kerangka Pemikiran.

Agar penelitian memenuhi kaidah-kaidah keilmuan, perlu diangkat teori-teori dan konsep-konsep yang dapat menjadi landasan, teoritis bagi penelitian yang dilakukan. Teori-teori serta konsep-konsep yang diajukan, menurut penulis relevan dengan masalah yang menjadi objek penelitian ini, selain itu teori dan konsep tersebut menjadi landasan bagi pembangunan hipotesis yang akan diajukan untuk kemudian diuji, keberlakuannya melalui penelitian ini.

Hubungan internasional yang ruang lingkupnya mencangkup berbagai interaksi diantara suatu negara lainnya baik yang disponsori oleh negara maupun

yang tidak dan akan teranalisis melalui kebijakan luar negeri dimana proses-proses internasional antar bangsa terjadi dan dapat dilaksanakan Trygve Mathisen mengungkapkan dalam bukunya yang berjudul "*Methodology In Study On Internasional Relation*" yang meyebutkan bahwa Hubungan Internasional mempunyai arti:

> "Meliputi semua aspek internasional dari kehidupan sosial manusia, dalam arti semua tingkah laku manusia yang terjadi atau yang berasal dari suatu negara dan dapat mempegaruhi tingkah laku manusia di negara lain" (Mathisen,1984:11)

Sedangkan menurut K.J Holsti dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis" mendefinisikan Hubungan Internasional sebagai:

> "Hubungan internasional akan berkaitan erat dengan segala bentuk interaksi diantara masyarakat, negara baik yang dilakukan pemerintah maupun warga negaranya. Pengkajian Hubungan Internasional yang meliputi segala segi hubungan diantara berbagai negara di dunia meliputi kajian terhadap Lembaga Perdagangan Internasional, Palang Merah Internasional, Pariwisata, Transportasi, Komunikasi serta perkebangan nilai-nilai dan etika internasional" (Holsti,1992:27)

Selain konsep diatas, terdapat pendapat Hubungan Internasional menurut kaum pluralisme bahwa hubungan internasional didasarkan pada empat asumsi yaitu:

Empat asumsi Paradigma Pluralis, yaitu:

1. Aktor-aktor non-negara adalah entitas penting dalam Hubungan Internasional yang tidak dapat diabaikan, contohnya Organisasi Internasional baik yang pemerintahan maupun non-pemerintahan, aktor transnasional, kelompok-kelompok bahkan individu.

2. Negara bukanlah aktor Unitarian, melainkan ada aktor-aktor lainnya yaitu individu-individu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Dalam hal ini dalam pengambilan keputusan atau kebijakan suatu negara, tidak semata-mata absolut berdasarkan kepentingan negara tersebut, namun juga dalam pembuatan kebijakan atau keputusan dapat juga dipengaruhi oleh individu-indivu, kelompok kepentingan dan para birokrat. Hal tersebut terjadi karena suatu kebijakan yang diambil oleh suatu negara mewakili masyarakatnya.
3. Menentang asumsi realis yang menyatakan negara sebagai aktor rasional, dimana pluralis menganggap pengambilan keputusan oleh suatu negara tidak selalu didasarkan pada pertimbangan yang rasional, akan tetapi demi kepentingan-kepentingan tertentu.
4. Agenda dalam Politik Internasional adalah luas, pluralis menolak bahwa ide Politik Internasional sering didominasi dengan masalah militer. Agenda Politik Luar Negeri saat ini sudah berkembang dan militer bukanlah satu-satunya hal yang paling utama, tetapi ada hal-hal utama lain didalam Hubungan Internasional seperti ekonomi dan sosial. Contoh perhatian dari pluralis adalah dalam bidang perdagangan, keuangan, dan isu energi sehingga bagaimana hal-hal tersebut dapat menjadi perhatian utama dalam agenda politik internasional. Hal lain yang mempengaruhi dunia internasional menurut kaum pluralis adalah bagaimana mengatasi permasalahan populasi dunia di bagian negara-negara dunia ketiga. Masalah populasi

> tersebut dapat mempengaruhi keberadaan sumber daya alam yang berkaitan dengan isu ketahanan nasional suatu negara. (Viotti dan Kauppi, 1990:215).

Dalam pandangan kaum pluralis permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh suatu negara tidak hanya dapat diselesaikan oleh actor negara saja, tetapi aktor non-negara pun bisa berperan dalam mengatasi permasalahan dalam suatu negara tersebut. IFAD sebagai salah satu organisasi internasional yang mempunyai tujuan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang, mempunyai peran melalui program-program yang dirancangnya dalam mengatasi permasalahan- permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat pedesaan.

Pada dasarnya, Hubungan Internasional mengacu pada seluruh bentuk interaksi hubungan antar negara. Hubungan yang terjadi di antara negara-negara tersebut dapat merupakan suatu hubungan kerjasama atau merupakan hubungan yang ditandai dengan konflik atau persaingan. Setiap individu pasti memerlukan individu lain dalam memenuhi kebutuhannya. Mereka tidak bisa hidup sendiri karena, pada dasarnya, semua individu pasti mempunyai kekurangan yang mungkin dapat ditutupi oleh individu lainnya. Demikian pula halnya dengan negara. Setiap negara akan melakukan interaksi dengan negara lainnya dalam upaya untuk memenuhi kebutuhan nasionalnya dan mencapai suatu kepentingan bersama. Interaksi yang terjadi antar negara tersebut didasari oleh adanya keterbatasan dari tiap negara dalam upaya mereka untuk memenuhi kebutuhan nasional mereka.

Wiriatmadja dalam bukunya "Pengantar Hubungan Internasional“ menyatakan bahwa:

> "Hubungan Internasional mencakup semua hubungan antar bangsa dan kelompok-kelompok bangsa dalam masyarakat dunia, dan kekuatan, tekanan, proses, yang menentukan cara hidup, cara berpikir dan cara bertindak manusia“ (Wiriatmadja, 1967: 33-34).

Organisasi internasional diartikan sebagai ikatan formal yang melampaui batas-batas wilayah nasional yang ditetapkan untuk membentuk suatu mesin kelembagaan agar dapat memudahkan kerjasama di antara pihak yang terkait dalam berbagai bidang. Organisasi internasional sebagai aktor internasional dianggap memberikan keuntungan terhadap negara, di mana ia berperan aktif di dalamnya

Leroy Bennet dalam buku *“International Organization”, Principle and Issue”* mengungkapkan bahwa:

> “Fungsi utama dari organisasi internasional adalah untuk memberikan makna dari kerjasama yang dilakukan antara negara-negara dalam satu area, di mana kerjasama tersebut memberikan keuntungan untuk negara-negara yang terlibat di dalamnya (Bennet, 1995: 3).

Selain itu, organisasi internasional juga harus berfungsi bagi negara-negara anggotanya. Menurut Bennet dalam buku “*International Organization, Principle and Issue*” fungsi organisasi internasional adalah:

1. Menyediakan sarana kerjasama antarnegara, yang mana kerjasama tersebut menyediakan manfaat bagi semua anggotanya.
2. Menyediakan berbagai saluran komunikasi antar pemerintah, agar area akomodasi dapat dieksplorasi dengan mudah terutama katika muncul suatu permasalahan (1995: 3).

Kerjasama internasional menurut pendapat Koesnadi Kartasasmita dalam bukunya *"Organisasi Internasional"* memberikan pengertian kerjasama sebagai berikut:

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai terdapatnya hubungan interdependensia dan bertambah kompleknya kehidupan manusia dalam masyarakat internasional. Kerjasama internasional terjadi karena nasional Understanding dimana mempunyai corak dan tujuan yang sama keinginan yang didukung untuk kondisi internsional yang sama, keinginan yang didukung untuk kondisi internasional yang saling membutuhkan. Kerjasama itu didasari oleh kepentingan bersama diantara negara-negara namun kepentingan itu tidak identik" (1983:20)

Sedangkan menurut Daniel F. Chiver dalam bukunya "*Organizing of Peace*" organisasi internasional adalah:

> "Pengaturan bentuk kerjasama internasional yang melembaga antara negara-negara, pada umumnya berlandaskan suatu persetujuan dasar untuk melaksanakan fungsi-fungsi yang memberikan manfaat yang timbale balik dan dijentawahkan melalui pertemuan-pertemuan serta kegiatan secara berkala" (1993:367)

Pada kenyataanya menunjukan, bahwa tidak ada satu pun negara yang dapat hidup sendiri tanpa mengadakan suatu hubungan kerjasama dengan negara kebutuhan nasionalnya, menurut Koesnadi Kartasasmita, dalam bukunya *"Administrasi Internasional"* bahwa:

> "Kerjasama dalam masyarakat internasional merupakan suatu keharusan sebagai dari adanya interdependensi dan bertambah kompleknya kehidupan dalam masyarakat internasional" (1987:20)

Dilihat dari aktor-aktor yang terlibat dalam sistem international, ada 3 aktor, yaitu aktor negara, aktor supranasional, dan aktor transnasional. Negara mempunyai wilayah, struktural pemerintahan, dan kedaulatan. Aktor supranasional mempunyai beberapa karateristik, yaitu, mempunyai anggota yang

terdiri dari negara-negara individual, dan dalam beberapa aspek, aktor ini mempunyai wewenang diatas negara-negara anggotanya. Ada beberapa tipe dari aktor supranasional ini, yaitu, organisasi universal dengan tujuan umur, organisasi regional, aliansi, dan rezim.

Sedangkan aktor Transnasional terdiri dari *Inter-Governmental Organization* (IGO's), dan *Non-Governmental Organization* (NGO's). Aktor ini mempunyai beberapa tugas atau fungsi khusus, dan mereka beroperasi melintasi batas negara, serta mempunyai orientasi untuk tidak terikat pada pandangan atau kepentingan suatu anggota.

Menurut Soerjono Soekanto dalam bukunya *"Sosiologi Suatu Pengantar"* menyatakan bahwa:

> "Pada kenyataanya aktor negara tidak selalu dapat memenuhi kebutuhannya sendiri, karena keterbatasan sumber daya yang dimilikinya. Karena itulah, muncul suatu bentuk kerjasama internasional yang bukan saja untuk memenuhi kepentingan, akan tetapi juga untuk menggabungkan kompetensi yang terbatas. Sehingga tujuannya dapat tercapai. (1997:79)

Kerjasama merupakan bentuk interaksi sosial. Kerjasama adalah suatu usaha bersama antara orang perorangan atau kelompok manusia untuk mencapai satu atau beberapa tujuan.

Ada asumsi yang mengatakan bahwa baik persoalan maupun sasaran tertentu tidak mungkin dicapai hanya dengan mengandalkan kekuatan sendiri. Kerjasama akan diusahakan apabila manfaat yang diperoleh diperkirakan akan lebih besar daripada konsekuensi-konsekuensi yang harus ditanggungnya. Oleh sebab itu keberhasilan kerjasama ditentukan oleh sifat dari tujuan dan kerjasama

yang hendak dicapai. Kerjasama diawali dengan kesepakatan dan yang paling mudah apabila tidak mengandung banyak resiko.

Kerjasama yang dilakukan oleh IFAD dengan negara-negara berkembang, dapat digunakan untuk meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan negaranya. IFAD, sangat diharapkan dalam membantu pembangunan pertanian di negara-negara berkembang, melalui bantuan teknis dan administratifnya. Peranan menurut K.J Holsti yang diterjemahkan Wawan Juanda dalam bukunya "Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis' yaitu :

> "Konsep peranan bisa dianggap definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum, keputusan, aturan, dan fungsi negara dalam suatu atau beberapa masalah internasional. Peranan juga mereflesikan kecenderungan pokok, kekhawatiran, serta sikap terhadap lingkungan eksternal dan variable sistematik geografi dan ekonomi" (1992:159)

Secara umum peranan dapat dilihat sebagai tugas atau kewajiban atas suatu posisi sekaligus hak atas suatu posisi, peranan memiliki sifat saling tergantung (Perwita&Yani, 2001; 30). Adapun definisi lain dari peranan menurut Soekamto dimana peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi (1990: 269).

Sedangkan dalam pengertian lain konsep peranan dikemukakan sebagai berikut:

> "Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum berupa keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan negara dalam suatu masalah atau berbagai masalah internasional". (Holsti, 1987: 159).

Kehadiran IFAD sebagai salah satu organisasi yang memberikan bantuan yang cukup besar sangat besar artinya bagi masyarakat pedesaan di Sulawesi tengah khususnya dan bagi pemerintah Indonesia kehadirannya tersebut meringankan pemerintah Indonesia dalam proses pembangunan pertananian dan peningkatan mata pencaharian terutama dari segi pendapatan. Apa yang dilakukan oleh IFAD dalam proses tersebut mempertegas peranan dari sebuah organisasi internasional seperti yang dikemukakan oleh T. May Rudy dalam buku *"Organisasi dan Administrasi Internasional"* yakni :

1. Wadah atau forum untuk menggalang kerjasama serta untuk mencegah atau mengurangi intensitas konflik (sesama anggota).
2. Sebagai sarana untuk perundingan dan menghasilkan keputusan bersama yang saling menguntungkan.
3. Sebagai lembaga yang mandiri untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan (antara lain kegiatan sosial kemanusiaan, bantuan untuk pelestarian lingkungan hidup, pemugaran monumen bersejarah, *peace keeping operation* dan lain-lain (1998: 27).

Masalah kemiskinan tidak bisa dianggap sederhana, karena akibat yang ditimbulkannya sangat berdampak terhadap perekonomian sebuah rumah tangga, dalam hal ini IFAD sebagai sebuah organisasi internasional yang bergerak dalam bidang pertanian, melakukan upaya-upaya yang telah melakukan sumbangsih sangat besar dalam usahanya membangun pertanian dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di negara berkembang, melalui bantuan

keuangan dan program pengurangan kemiskinan mengenai betapa pentingnya pembangunan pertanian bagi masyarakat pedesaan di masa yang akan datang.

Menurut Soekamto Peranan merupakan suatu konsep tentang apa yang dilakukan oleh individu dalam bermasyarakat sebagai organisasi (Soekamto, 1990:269).

Sedangkan Holsti dalam bukunya *"Politik Internasional Suatu Kerangka Analisis"* mengemukakan konsep peranan sebagai berikut :

> "Konsep peranan bisa dianggap sebagai definisi yang dikemukakan oleh para pengambil keputusan terhadap bentuk-bentuk umum berupa keputusan, komitmen, aturan, dan tindakan yang sesuai dengan negara dalam suatu masalah atau berbagai masalah internasional (Holsti, 1987:159).

IFAD menilai bahwa penyebab kemiskinan bagi masyarakat pedesaan dikarenakan institusi-institusi di pedesaan kurang tanggap dalam menagani permasalahan-permasalahan yang di hadapi oleh masyarakat pedesaan, kemiskinan di pedesaan juga disebabkan oleh kurangnya akses bagi para petani dalam menyalurkan dan mendistribusikan hasil pertanian mereka ke pasar, sehingga mereka tidak dapat menghasilkan pendapatan dari hasil pertaniannya. Oleh karena itu IFAD dalam programnya selalu berusaha untuk membenahi prasarana-prasarana yang ada di pedesaan termasuk membenahi institusi-institusi pedesaan dan akses layanan pasar, sehingga masyarakat pedesaan dapat meningkatkan pendapatan mereka.

Pendapatan merupakan perolehan barang atau uang yang diterima atau dihasilkan. Seperti pada masyarakat petani bahwa besar kecilnya pendapatan petani dari usaha taninya terutama ditentukan oleh luas lahan garapan, selain itu

faktor lain juga turut menentukan antara lain produktifitas dan kesuburan tanah, jenis komoditi yang diusahakan serta tingkat penerapan teknologi pertanaian

Menurut Rachman dan Hadimuslihat definisi pendapatan ialah:

> "keragaman sumberdaya mempengaruhi struktur pendapatan rumah tangga pedesaan. Sumber pendapatan rumah tangga di suatu lokasi erat kaitannya. (Rachman & Hadimuslihat, 1989:2)

Sedangkan menurut Adnyana et, al. Secara garis besar ada dua sumber pendapatan rumah tangga pedesaan yaitu:

> "Sektor pertanian dan non-pertanian. Struktur dan besarnya pendapatan dari sektor pertanian berasal dari usahatani/ternak dan berburuh tani. Sedangkan dari sektor nonpertanian berasal dari usaha nonpertanian, profesional, buruh non pertanian dan pekerjaan lainnya di sektor non pertanian. (http://ejournal.unud.ac.id/abstrak/(13)%20socasupadirozanypengel%20rt(1). pdf, [diakses 20 April 2009])

Sebagian besar penduduk pedesaan di Sulawesi tengah bermata pencaharian sebagai petani, hal ini disebabkan oleh keadaan alam di Sulawesi tengah serta tingkat pengetahuan dan pendidikan masyarakat pedesaan di Sulawesi tengah, dalam hal ini IFAD memberikan bantuan kepada masyarakat pedesaan dalam upaya meningkatkan pendapatan, dengan cara memberdayakan masyarakat pedesaan melalui pelatihan-pelatihan yang membuat masyarakat pedesaan tersebut mempunyai keterampilan yang lebih baik, selain memberdayakan masyarakat pedesaan, IFAD juga memberikan bantuan dalam programnya berupa pengembangan pertanian budidaya dan non-budidaya, pembangunan prasarana pertanian dan pengelolaan program dan analisis

kebijakan yang semuanya itu merupakan langka-langkah dari IFAD guna meningkatkan pendapatan dan mata pencaharian rumah tangga mereka.

Dengan demikian peranan IFAD memang sangat dibutuhkan oleh Indonesia dalam menangulangi kemiskinan dan meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan yang saat ini sedang berjalan. Sebagai Organisasi Internasional, IFAD sangat aktif memberikan bantuan terhadap negara-negara berkembang dalam mengatasi permasalahan yang ada khususnya mengenai pertanian dan peningkatan mata pencaharian dan pendapatan masyarakat pedesaan di negara-negara berkembang.

1.6.2 Hipotesis

Berdasarkan asumsi-asumsi tersebut diatas, maka hipotesis didalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

"IFAD berperan dalam membantu meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah melalui program READ dengan menerapkan empat komponen yang terdiri dari pemberdayaan masyarakat, pengembangan usaha pertanian budidaya dan non-budidaya, prasarana pedesaan, dan program pengelolaan dan analisis kebijakan".

1.6.3 Definisi Operasional

Sesuai dengan judul yang penulis ambil yaitu: **Peranan *International Fund For Agricultulral Development* (IFAD) Melalui Program *Rural Empowerment And Agricultural Development* Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat Pedesaan Di Sulawesi Tengah**, maka terdapat

beberapa definisi operasional yang berhubungan dengan judul tersebut, diantaranya yaitu:

1. *International Fund For Agricultural Development* (IFAD) adalah sebuah organisasi internasional dibawah Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) yang bergerak dalam bidang pertanian di negara-negara berkembang.
2. *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ) merupakan sebuah konsep program bantuan untuk meningkatkan pendapatan dan mengangkat kondisi kehidupan keluarga miskin di propinsi Sulawesi Tengah.
3. Pengembangan pendapatan masyarakat pedesaan dalam program READ di Sulawesi Tengah melalui empat komponen yang terdiri dari:
   a. Pemberdayaan masyarakat
   b. Pengembangan usaha pertanian budidaya dan non-budidaya
   c. Prasarana pedesaan
   d. Pengelolaan program dan analisis kebijakan

1.7 Metodelogi Penelitian dan Teknik Pengumpulan Data.

1.7.1 Metodologi Penelitian.

Metode penelitian bermakna sempit maupun luas. Dalam artian sempit, metode penelitian berhubungan dengan rancangan penelitian dan prosedur-prosedur pengumpulan data serta analisis data. Dalam artian luas, metode penelitian merupakan cara yang teratur untuk mendapatkan informasi yang

berhubungan dengan masalah yang diselidiki, yang dibutuhkan sebagai solusi atas masalah tersebut (Silalahi, 1999: 6). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode historis analitis, yaitu prosedur pemecahan masalah dengan menggunakan data masa lalu atau peninggalan-peninggalan, baik untuk memahami kejadian atau suatu keadaan yang berlangsung pada masa lalu terlepas dari keadaan masa sekarang maupun untuk memahami kejadian atau keadaan masa sekarang dalam hubungannya dengan kejadian atau keadaan masa lalu, selanjutnya kerap kali hasilnya dapat dipergunakan untuk meramalkan kejadian atau keadaan masa yang akan datang. Dengan kata lain, metode historis analitis dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu:

1. Untuk menggambarkan gejala-gejala yang terjadi pada masa lalu sebagai suatu rangkaian peristiwa yang berdiri sendiri, terbatas dalam kurun waktu tertentu di masa lalu.
2. Menggambarkan gejala-gejala masa lalu sebagai sebab suatu keadaan atau kejadian pada masa sekarang sebagai akibat. Data masa lalu itu dipergunakan sebagai informasi untuk menjelaskan kejadian atau keadaan masa sekarang sebagai rangkaian yang tidak terputus atau saling berhubungan satu dengan yang lain (Zulnaidi, 2007: 14).

1.7.2 Teknik Pengumpulan Data

Penulis menggunakan teknik pengumpulan data Studi kepustakaan *(library research)* dan teknik wawancara, dengan mengumpulkan data dan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh pemerintah dan organisasi internasional

terkait, buku-buku teks, dan dokumen yang berhubungan dengan masalah penelitian dan sesuai dengan teori yang dikembangkan oleh para ahli, serta penggunaan jasa internet melalui *website* yang berhubungan dengan penelitian yang di teliti, sehingga mendapatkan data-data tertulis yang dapat di dokumentasikan.

1.8 Waktu dan Lokasi Penelitian.

1.8.1 Waktu Penelitian.

Penelitian ini berlangsung sejak bulan Februari 2009 sampai dengan Juli 2009, yang dapat dirinci sebagai berikut:

Tabel 1
Tabel Kegiatan Penelitian (Februari 2009 – Agustus 2009)

No	Kegiatan	Waktu Penelitian					
		Tahun 2009					
		Feb	Mar	Aprl	Mei	Jun	Jul
1	Pengajuan Judul						
2	Usulan Penelitian						
3	Seminar Usulan Penelitian						
4	Bimbingan						
5	Pengumpulan Data						
6	Sidang						

1.8.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan di beberapa lokasi, yaitu:

1. Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM), Bandung.
2. Perpustakaan Universitas Katolik Parahyangan, Bandung.
3. Perpustakaan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pasundan, Bandung.

4. Departemen Pertanian Republik Indonesia Indonesia, Jakarta.

1.9 Sistematika Pembahasan

Penulisan skripsi ini dibagi atas lima bab, dimana setiap bab terdiri dari sub-sub bab yang disesuaikan dengan keperluan penelitian, secara sistematis penulisan ini ditulis sebagai berikut;

BAB I, Pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang penelitian, identifikasi penelitian, maksud dan tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka pemikiran, metode penelitian, lokasi dan waktu penelitian.

BAB II, Tinjauan Pustaka, merupakan hasil telusuran tentang kepusatakaan yang mengupas topik penelitan yang sama, hal ini merupakan bukti pendukung bahwa topik atau materi yang diteliti memang suatu permasalahan yang penting, sebagaimana ditunjukan oleh kepustakaan yang dirujuk, seperti dalam teori Hubungan Internasional, Paradigma Pluralis, Kerjasama Internasional, Organisasi Internasional, *Inter-Govermental Organization* (IGO), *International Fund For Agricultural Development* (IFAD), Teori Peranan, Teori Pendapatan, dan Teori Peningkatan Pendapatan.

BAB III, Objek Penelitian, yang memberikan gambaran umum mengenai *International Fund For Agricultural Development* (IFAD), Program *Rural Empowerment and Agricultural Development* (READ) khususnya struktur pengelolaan IFAD yang dihubungkan dengan proses pemberian bantuan peningkatan pendapatan masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.

BAB IV, Hasil Penelitian dan Pembahasan, dalam bagian hasil, dilaporkan data-data yang diperoleh dalam langkah-langkah IFAD melalui program READ di Sulawesi Tengah dan menjelaskan prospek dalam meningkatkan pendapatan masyarakat pedesaan setelah direalisasikan program READ.

BAB V, Kesimpulan dan Saran, kesimpulan merupakan intisari hasil analisis dan interpretasi, cara penulisan/pembahasan dirumuskan dalam bentuk pernyataan, sehingga tidak menimbulkan penafsiran lain. Informasi yang disampaikan dalam kesimpulan ini berupa proses pelaksanaan program READ melalui empat komponen pengembangan tingkat pendapatan masyarakat pedesaan. Saran merupakan kelanjutan dari kesimpulan. Dalam konteks READ maka saran merupakan penjelasan mengenai prospek kondisi pertanian dan peningkatan mata pencaharian masyarakat pedesaan di Sulawesi Tengah.